

# Kelas Menengah di Indonesia: Tinjauan Sosial-Ekonomi

Nancy K. SUHUT\*

Penentuan anggota kelas dalam masyarakat sulit untuk didefinisikan secara tegas karena adanya berbagai pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Joseph A. Kahl mengelompokkan masyarakat Amerika dalam 5 kelas, yaitu kelas atas, menengah atas, menengah bawah, pekerja dan kelas bawah.<sup>1</sup> Yang termasuk kelas menengah atas adalah pengusaha/wiraswasta dan tenaga profesional yang berhasil (sukses), termasuk anggota keluarga mereka, tetapi bukan yang paling atas. Pendapatannya terutama berasal dari pekerjaannya pada saat ini, jadi tekanannya pada karir jangka panjang. Mereka tinggal di daerah-daerah yang baik dengan rumah-rumah yang besar atau di apartemen yang paling baik. Kebanyakan dari mereka adalah sarjana dan menguasai bidang industri dan organisasi kemasyarakatan. Sedangkan kelas menengah bawah terdiri dari mereka yang kurang berhasil dalam lembaga pemerintahan, wiraswasta dan profesi, serta karyawan swasta yang cukup berhasil. Mereka tinggal di rumah-rumah yang kecil atau kopel. Kebanyakan dari mereka tamatan SLA dengan tambahan kursus kejuruan. Mereka merupakan model masyarakat biasa yang populer di Amerika. Mereka mengutamakan kehormatan (respectability).

Dalam beberapa tahun terakhir, di Jepang juga muncul perdebatan yang berkisar pada sifat dan masa depan kelas menengah di Jepang.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan antara lain oleh meningkatnya standar hidup masyarakat Jepang

---

\*Staf CSIS.

<sup>1</sup>Joseph A. Kahl, "Classes As Ideal Types: Emergent Values," *The American Class Structure*, hal. 215-216.

<sup>2</sup>Kunio Odaka, "The Middle Classes in Japan," dalam Reinhard Bendix dan Seymour Martin Lipset (eds.), *Class, Status, and Power* (New York: The Free Press), Cetakan ke-2.

khususnya kelas pekerja sejak boom tahun 1956. Alasan yang lebih kuat dari perdebatan tersebut dapat dijumpai dalam kampanye-kampanye yang dimulai baik oleh partai konservatif maupun progresif melalui slogan "jadikan semua orang kelas menengah." Di samping karena alasan politis, mungkin juga karena meningkatnya jumlah kelas menengah baru (kelas pekerja) di Jepang, seperti pekerja kantor, teknisi, administrator, baik di perusahaan swasta maupun pemerintah, guru dan lain-lain. Peningkatan ini tentu saja banyak mengubah lapangan kerja dan gaya hidup mereka.

Dari uraian ini tampak bahwa perubahan standar hidup akan mengubah tatanan kelas dalam masyarakat. Seringkali dikatakan bahwa kelas menengah merupakan kelompok masyarakat yang selalu tidak puas dengan keadaan sosial-ekonomi walaupun ditinjau dari sudut ekonomi mereka tidak termasuk kelompok yang berkekurangan. Sikap mereka yang selalu "agresif" untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan biasanya akan membawa mereka pada strata sosial-ekonomi yang lebih baik. Mereka akan selalu berusaha meningkatkan karir karena hal ini dapat meningkatkan gengsi (prestige) mereka. Karenanya menarik untuk diperhatikan mereka yang termasuk dalam kelompok kelas menengah, terutama sikap mereka terhadap masalah-masalah sosial ekonomi.

Farchan Bulkin<sup>3</sup> menunjukkan pentingnya peranan kelompok ini berdasarkan sejarah politik ekonomi Indonesia yang ditunjukkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai penghubung antara negara dan masyarakat, mempunyai kesadaran akan kondisi yang diperlukan untuk mengejar kepentingan politik dan ekonomi mereka serta merupakan kelompok yang dapat segera diketahui bahwa mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang mendominasi Indonesia. Tetapi Loekman Soetrisno<sup>4</sup> mengatakan bahwa secara teoretis, pada dasarnya masyarakat Indonesia setelah merdeka tidak memiliki suatu kelas menengah dalam pengertian sesungguhnya, yaitu sebagai kelompok manusia Indonesia yang benar-benar merdeka dalam pandangan politik dan memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan menentukan. Hal ini disebabkan karena pada jaman penjajahan "embrio-embrio" yang diharapkan dapat berkembang menjadi suatu golongan menengah di Indonesia, yaitu para saudagar Indonesia yang aktif dalam perdagangan laut, para artisan (pengrajin) dan petani kaya dimatikan karena peranan mereka telah diambil alih (diatur) oleh penjajah.

---

<sup>3</sup>Farchan Bulkin, "Teknokrasi dan Politik," *Prisma*, No. 3, Maret 1983.

<sup>4</sup>Loekman Soetrisno, "Pergeseran dalam Golongan Menengah di Indonesia," *ibid.*

## SEJARAH PERKEMBANGAN "GOLONGAN MENENGAH" SETELAH MERDEKA

Apabila kita memperhatikan situasi politik setelah merdeka di Indonesia, tampaknya ada beberapa periode yang perlu diperhatikan, yaitu periode baru merdeka (dasawarsa pertama), periode pemerintahan Orde Lama (dasawarsa kedua) dan periode pemerintahan Orde Baru (dasawarsa 1970-an sampai sekarang).

Pada periode pertama jelas belum banyak perubahan dibandingkan dengan masa penjajahan karena semua masih dalam masa peralihan dan pembenahan. Pada masa itu kelas menengah di Indonesia terdiri atas golongan birokrat dan para cendekiawan yang berpendidikan Barat dan kagum akan keberhasilan Barat.

Pada periode berikutnya sudah mulai jelas pergeserannya, karena munculnya ABRI dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang disebabkan oleh nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda sehingga ABRI merupakan kekuatan sosial baru dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu banyak pengusaha-pengusaha yang didukung oleh partai-partai politik yang timbul akibat lisensi yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan partai politik yang menguasai departemen atau kementerian yang mudah menghasilkan uang dengan dalih untuk menghimpun dana partai, yang akhirnya mengakibatkan keinginan untuk menumpuk kekayaan menjadi semakin besar. Pada periode ini mereka yang termasuk kelas menengah dari sudut ekonomis mulai bergeser kepada para birokrat sipil dan anggota ABRI walaupun pengetahuan dan kemampuan manajerial mereka dapat dikatakan sangat kurang.

Pada masa pemerintahan Orde Baru ternyata keadaannya agak berbeda, karena pada masa ini perekonomian Indonesia sangat berbeda keadaannya dengan periode-periode sebelumnya yang tentu saja mempengaruhi juga perkembangan "kelas menengah" di Indonesia selanjutnya. Pada pemerintahan Orde Baru ini, modal asing merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan di samping hasil ekspor minyak bumi yang cukup mengejutkan dan hal ini sangat berlawanan keadaannya dengan keadaan pada masa pemerintahan Orde Lama. Di samping modal asing sebagai penggerak perekonomian Indonesia, mobilitas politik dan pendidikan pun merupakan faktor yang turut menimbulkan perubahan dalam tatanan kelas menengah di Indonesia. Tetapi dalam tulisan ini hanya akan dibahas hal-hal yang menyangkut masalah ekonomi saja. Kekuatan ekonomis dalam masyarakat Indonesia kini terdiri dari di samping pengusaha-pengusaha lama seperti telah ada pada periode sebelumnya, juga mereka yang telah bergabung dengan para investor asing atau mereka yang telah memanfaatkan modal asing dalam

usahanya tentunya ditambah dengan tenaga-tenaga profesional dan pegawai negeri. Sepintas lalu tampak bahwa dari sudut sosial ekonomi kedudukan kelas menengah sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pada saat itu, sehingga sejak kemerdekaan sampai sekarang ketergantungan pada pemerintah masih ada baik dalam masalah ekonomi maupun politik.

## KELAS MENENGAH DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU

Secara khusus akan diteliti mengenai peranan kelas menengah di Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan Orde Lama. Modal mengalir lebih cepat pada masa ini terutama pada dasawarsa 1970-an dikarenakan oleh mengalirnya modal asing dari luar negeri dan kenaikan harga ekspor minyak yang dengan sendirinya membantu mempercepat peningkatan perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi yang cepat ini mendorong munculnya "kelas menengah" baru yang terdiri dari para pengusaha dan tenaga profesional muda. Mereka berusaha mengisi kesempatan-kesempatan yang ada dengan menjalin hubungan yang baik dengan kalangan birokrat atau muncul dari antara keluarga para birokrat itu sendiri. Namun perkembangan yang cukup pesat itu tidak menimbulkan perubahan dalam kehidupan perekonomian Indonesia, dalam arti peranan pemerintah tetap besar dalam perekonomian nasional Indonesia. Hal ini menimbulkan "ketergantungan" para pengusaha yang semakin besar pada pemerintah demi kelangsungan usaha mereka. Tetapi ketergantungan ini sebenarnya bukan hanya ada pada kalangan pengusaha saja, tetapi juga pada kelompok-kelompok lainnya termasuk politikus, hanya bobot ketergantungan tidak sama pada masing-masing kelompok sesuai dengan kepentingan mereka. Ketergantungan para pengusaha bukanlah dalam pengertian modal tetapi berbentuk kemudahan-kemudahan (fasilitas-fasilitas) seperti izin usaha. Izin usaha ini sulit diperoleh karena adanya "prioritas-prioritas" yang harus dipertimbangkan, sehingga pemberian izin ini pun harus berdasarkan "prioritas" tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat timbul pertanyaan, apakah status mereka memang berbeda dari kelompok-kelompok lainnya. Dapat dikatakan bahwa yang disebut kelas menengah di Indonesia muncul karena posisi mereka yang amat khusus terutama dalam bidang ekonomi. Mereka bukan merupakan kelompok "elite" (atas) juga bukan kelompok "bawah," tetapi posisi mereka sangat strategis terutama dalam kegiatan pembangunan nasional kita. Mereka merupakan orang-orang yang aktif memimpin dunia usaha terutama bergerak dalam dunia bisnis dan profesi serta mengambil keputusan dalam menjalankan usahanya sehari-hari. Sebenarnya mereka tidak terpaku pada satu pekerjaan rutin, tetapi menduduki berbagai jabatan, mereka bukan bekerja semata-mata untuk mencari nafkah tetapi mengejar karir. Yang termasuk kelompok ini adalah para pengusaha/wiraswasta, tenaga profesional

seperti dokter, pengacara, wartawan, seniman, guru/dosen, pegawai negeri, politikus, karyawan swasta dan mahasiswa. Mahasiswa dianggap cukup penting karena mereka mempunyai peranan tersendiri sebagai kelompok kelas menengah. Secara ekonomis mereka belum pantas disebut kelas menengah, tetapi mereka juga bukan merupakan kelompok yang hanya menerima perintah seperti kelas "bawah."

## PANDANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam suatu penelitian lapangan yang dilakukan oleh CSIS pada awal tahun 1985,<sup>5</sup> diteliti mengenai sikap dan pandangan golongan menengah di Indonesia terhadap pembangunan nasional dan hubungan luar negeri (tetapi dalam tulisan ini hanya akan diambil sebagian dari hasil penelitian mengenai sikap terhadap pembangunan nasional). Penelitian ini cukup menarik, baik dari cara pengambilan (pemilihan) sampel maupun materi penelitian itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan di dua kota besar, Jakarta dan Yogyakarta ini mengambil sampel secara purposive dengan membuat asumsi bahwa yang termasuk golongan menengah antara lain adalah pegawai negeri, tenaga profesional, pengusaha/wiraswasta dan lainnya (termasuk politikus dan mahasiswa). Responden berusia antara 20-55 tahun. Cukup menarik adalah bahwa dari hasil penelitian ini ternyata lebih dari 80% responden lulusan perguruan tinggi dan hanya 0,3% yang hanya lulus sekolah dasar (SD). Berdasarkan penetapan dua kota yang berbeda situasinya kita sudah dapat memperkirakan bagaimana perbedaan pendapatan mereka dan hal ini pun dibuktikan oleh hasil penelitian. Hampir 80% responden di daerah Yogyakarta berpendapatan kurang dari Rp 400.000,00 per bulan, sedangkan responden di Jakarta hanya sekitar 50% (termasuk mahasiswa sekitar 12% dari jumlah responden di Jakarta) berada dalam kelompok pendapatan tersebut. Yang berpendapatan antara Rp 400.000,00 sampai Rp 1.000.000,00 di Jakarta hampir 35% sedangkan di Yogyakarta hanya sekitar 20%.<sup>6</sup> Kenyataan ini menarik untuk diamati, karena walaupun mereka bekerja di bidang yang sama ternyata pendapatannya lebih besar di Jakarta.<sup>7</sup> Dari hasil penelitian, tampak bahwa "kelas me-

<sup>5</sup>Hasil penelitian belum dipublikasikan.

<sup>6</sup>Pengelompokan tingkat pendapatan dan persentase responden pada masing-masing kelompok (untuk Jakarta termasuk mahasiswa):

	Yogyakarta (%)	Jakarta (%)
Kurang dari Rp 400.000,00	76,2	48,2
Rp 400.000,00 sampai Rp 1.000.000,00	18,5	34,1
Di atas Rp 1.000.000,00	5,3	17,7

<sup>7</sup>*Ibid.*

nengah" baik di Jakarta maupun di Yogyakarta mempunyai persepsi yang sama mengenai pembangunan nasional. Mereka menganggap bahwa "pembangunan ekonomi" merupakan sasaran nasional yang ingin dicapai pada dasawarsa terakhir ini (Yogyakarta 83,4%, Jakarta 75,3%). Hal ini dapat berarti bahwa bagi golongan menengah di Indonesia bidang ekonomi lebih penting daripada bidang-bidang lainnya atau masalah lainnya, seperti sosial dan politik, dianggap sudah baik (tidak perlu dipermasalahkan lagi) atau karena disadari bahwa pembangunan ekonomi adalah syarat pembangunan sosial politik. Yang dimaksudkan dengan pembangunan ekonomi adalah "peningkatan pemerataan kesejahteraan dan kesempatan" (Yogyakarta 31,8%, Jakarta 35,2%) dan "pengembangan sistem pendidikan yang tepat" (Yogyakarta 21,9%, Jakarta 18,2%). Di sini kita melihat bahwa kesejahteraan dan kesempatan yang merata serta masalah pendidikan merupakan perhatian utama masyarakat Indonesia dewasa ini.

Penilaian terhadap perkembangan ekonomi dalam dasawarsa yang lalu cukup positif, dalam arti hanya sebagian kecil responden (Yogya 6,6%, Jakarta 14,0%) yang merasa tidak puas dengan penerapan kebijakan ekonomi sejak dimulainya Repelita I.

Ketika harus menjawab pertanyaan mengenai bidang pembangunan ekonomi di negara kita yang paling besar dan paling kecil kemajuannya sejak tahun 1970, untuk yang paling besar kemajuannya baik Yogyakarta maupun Jakarta memberikan pilihan pertama yang sama, yaitu "produksi dan suplai pangan." Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia saat ini sudah swasembada pangan (beras) dan pilihan berikutnya adalah "pendidikan" dan "sarana fisik" seperti pengangkutan dan komunikasi. Untuk yang paling kecil kemajuannya, responden di kedua kota memberikan pilihan utama pada "peningkatan kesempatan kerja," "pengurangan kemiskinan" dan "efisiensi pemerintah." Di sini kita melihat bahwa masalah kesempatan kerja masih merupakan hal yang memprihatinkan di negara kita di samping masalah kemiskinan yang selalu hangat dipermasalahkan. Birokrasi pemerintahan seringkali menyebabkan tidak efisiennya pekerjaan. Ketika diminta untuk menjelaskan maksud pembangunan ekonomi, sebagian besar responden mengemukakan untuk memperkecil kesenjangan antara kaya dan miskin (Yogyakarta 88,1%, Jakarta 81,8%) yang diikuti oleh peningkatan produksi pangan dan menciptakan program-program kesejahteraan sosial yang mendasar.

Lebih dari separuh responden melihat strategi pembangunan Indonesia didasarkan pada pembangunan yang seimbang antara industri manufaktur dan pertanian. Hal ini tentu saja sejalan dengan kebijakan pemerintah seperti dinyatakan dalam rencana pembangunan negara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ternyata bahwa perbedaan pendapatan tidak atau kurang mempengaruhi sikap dan pandangan kelompok kelas menengah terhadap pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dari seluruh pertanyaan yang diajukan yang menyangkut pembangunan nasional (termasuk masalah sosial ekonomi), tidak tampak perbedaan yang berarti dalam tingkat kepuasan/ketidakpuasan responden di kedua tempat.

Kelas menengah di Indonesia tampaknya memberikan bobot yang tinggi pada para cendekiawan (Yogyakarta 42,4% dan Jakarta 35,3%) sebagai kelompok yang diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam pembangunan negara kita, di samping politikus (Yogyakarta 19,2%, Jakarta 21,2%) dan pengusaha/wiraswasta (Yogyakarta 11,9%, Jakarta 11,8%). Pendapat ini sungguh menarik untuk dikaji lebih lanjut karena dalam kenyataan, hingga saat ini, yang memegang peranan penting (sebagai decision-maker) di negara kita di samping politikus/negarawan adalah ABRI yang mempunyai peranan ganda (dwifungsi) dan memegang kedudukan-kedudukan kunci pada beberapa tempat yang dianggap penting.

Yang menarik dari hasil penelitian ini yaitu mereka yang termasuk golongan menengah di Indonesia merupakan kelompok yang dapat menerima hasil pembangunan sebagai sesuatu yang positif, artinya di samping masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki, mereka juga melihat banyak keberhasilan di berbagai bidang. Memang mereka tidak sepenuhnya dapat bebas bergerak, karena kebebasan mereka telah dikompromikan dengan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi saran atau gagasan yang akan muncul yang nadanya bertentangan dengan program pemerintah.

## PENUTUP

Kelas menengah di Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan kelompok-kelompok serupa di negara-negara lain terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang atau negara kapitalis lainnya yang sama sekali tidak tergantung pada pemerintah. Di Indonesia kelas menengah belum merupakan kelompok yang aktif memberikan saran pada pemerintah melainkan kelompok yang telah melakukan "trade off" antara kebebasan mereka dengan berbagai kemudahan (fasilitas) yang disediakan oleh pemerintah.

Pengusaha misalnya, mengekang keinginannya untuk berpolitik secara aktif termasuk menyampaikan gagasan-gagasan pembaharuan yang bertentangan dengan pemerintah untuk memperoleh kemudahan-kemudahan yang diperlukan.

Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan tatanan kelas masyarakat di Indonesia sebagai akibat pergantian pemerintahan dan kenaikan harga ekspor minyak yang mendadak (pada periode Orde Baru). Kehadiran kelas menengah terutama dalam era pemerintahan Orde Baru ini penting, karena keberhasilan mereka dalam bidang ekonomi secara tidak langsung turut membantu meningkatkan kesempatan kerja melalui pembukaan usaha-usaha baru sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat lainnya.

Satu hal yang perlu dicatat dari uraian ini adalah bahwa dalam periode mana pun sejak Indonesia merdeka, ada kelompok yang berperan sebagai perantara antara negara dan masyarakat, yaitu mereka yang dianggap mampu untuk mencernakan kebijaksanaan pemerintah terutama dalam bidang ekonomi dan kemudian direalisasikan dalam usaha mereka sehari-hari.